



Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di Indonesia (2019-2022)

Hengki Ferdiansyah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
e-mail: hengki.ferdiansyah@uinjkt.ac.id

Muhamad Masrur Irsyadi

El-Bukhari Institute, Indonesia
e-mail: mas_roer@mhs.uinjkt.ac.id

Nurun Nisa'

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)
PBNU, Indonesia
e-mail: nurunnisa@lakpesdam.or.id

Zainuddin Lubis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
e-mail: zainudinlubis@gmail.com

Abi S. Nugroho

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam)
PBNU, Indonesia
e-mail: abisnugroho@lakpesdam.or.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis Konflik Keagamaan yang terjadi di Indonesia dari tahun 2019 hingga Agustus 2022, serta untuk mengidentifikasi peran Kementerian Agama dalam mengelola peran publik untuk mencegah dan mengatasi konflik tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan ini, kami melakukan analisis terhadap sekitar 86 kasus konflik keagamaan selama periode tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik keagamaan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu konflik antar agama dan konflik intra agama. Konflik intra agama, terutama di kalangan umat Islam, cenderung memiliki potensi konflik yang lebih tinggi daripada konflik antar agama, mengindikasikan tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap pemeluk agama lain. Kami juga mendapati bahwa konflik antar agama umumnya berhubungan dengan isu-isu terkait rumah ibadah,

pembatasan aktivitas keagamaan, dan pemaksaan atribusi agama tertentu. Di sisi lain, konflik intra agama melibatkan isu-isu seperti penyesatan kelompok dalam Islam, pembatasan aktivitas keagamaan, rumah ibadah, dan terorisme, dengan penyesatan kelompok menjadi isu yang dominan. Pemeluk agama Kristen dan kelompok Salafi sering menjadi korban dalam konflik ini. Selain itu, Kementerian Agama memegang peran strategis dalam penyelesaian konflik keagamaan melalui Subdit Bina Paham Kegamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) serta Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Mereka menggunakan berbagai pendekatan, termasuk dialog, partisipasi tokoh agama, dan penggunaan pernyataan publik, serta melibatkan penyuluh agama sebagai agen resolusi konflik. Meskipun memiliki potensi besar, penelitian juga mengungkapkan bahwa respons Kementerian Agama tidak selalu berhasil meredam konflik, dan terkadang bahkan dapat memperkuat eskalasi konflik, seperti yang terjadi dalam kasus pelarangan perayaan natal dan pendirian gereja di Dhamasraya pada tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia. Dalam periode penelitian ini, konflik keagamaan mengalami fluktuasi, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *Kementerian Agama; Konflik Keagamaan; Moderasi Beragama; Resolusi Konflik; Toleransi Beragama.*

Abstract

This research aims to map and analyze Religious Conflicts that occurred in Indonesia from 2019 to August 2022 and to identify the role of the Ministry of Religious Affairs in managing its public role to prevent and address these conflicts. To achieve this goal, we conducted an analysis of approximately 86 cases of religious conflicts during that period. The research findings reveal that religious conflicts in Indonesia can be divided into two main categories: inter-religious conflicts and intra-religious conflicts. Intra-religious conflicts, especially among Muslims, tend to have a higher potential for conflict than inter-religious conflicts, indicating a higher level of tolerance towards followers of other religions. We also found that inter-religious conflicts are generally related to issues concerning places of worship, restrictions on religious activities, and the imposition of specific religious attributes. On the other hand, intra-religious conflicts involve issues such as the misguidance of Islamic groups, restrictions on religious activities, places of worship, and terrorism, with the misguidance of groups being the dominant issue. Followers of the Christian faith and Salafi groups often become victims in these conflicts. Furthermore, the Ministry of Religious Affairs plays a strategic role in resolving religious conflicts through its Sub-Directorate for Islamic Religious Understanding and Conflict Handling (BPKI-PK) and the Center for Interfaith Harmony (PKUB). They employ various approaches, including dialogue, involvement of religious leaders, and the use of public statements, while

engaging religious counselors as conflict resolution agents. However, the research also reveals that the Ministry of Religious Affairs' responses do not always succeed in quelling conflicts and can sometimes even escalate them, as seen in the case of the ban on Christmas celebrations and the establishment of churches in Dhamasraya in 2019. Therefore, this study highlights the need to continually enhance the effectiveness of measures taken by the Ministry of Religious Affairs in resolving religious conflicts in Indonesia. During the research period, religious conflicts experienced fluctuations, with a significant increase in 2021 and 2022, emphasizing the importance of ongoing efforts to promote harmony among religious communities in Indonesia.

Keywords: *Ministry of Religious Affairs; Religious Conflicts; Religious Moderation; Conflict Resolution; Religious Tolerance*

Pendahuluan

Agama pada satu sisi mengajarkan tentang cinta dan kasih. Misi agama menyebarkan kasih sayang pada umat manusia. Dalam ajaran, esensi dari agama adalah memanusiaikan manusia. Agama, seyogianya mendorong pemeluknya untuk menciptakan perdamaian, dan membangun peradaban, untuk kemanusiaan yang hakiki. Sebaliknya, agama memiliki kekuatan paradoksial. Tak ada daya ledak yang lebih besar dari agama. Profesor Komaruddin Hidayat, dalam *Harian Kompas* 3 Desember 2020, menulis tak ada kekuatan yang melebihi agama. Klaim atas nama agama, seseorang rela hati mengorbankan nyawanya. Pun atas nama agama, marak sekali praktik intoleransi dan persekusi.

Berbagai praktik kekerasan dan konflik keagamaan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Rangkaian demi rangkaian, terus berkelindan terjadi di negara multi etnis dan agama ini. Konflik agama, menjadi akar utama dari rentetan konflik yang terjadi. Konflik berdarah Poso 25 Des 1998 – 20 Des 2001, konflik Sambas, konflik berdarah Tanjung Priok, serta berbagai kasus terorisme seperti Bom Bali I dan II, yang menewaskan ratusan orang. Konflik keagamaan berbasis sektarian, juga marak terjadi di Indonesia. Kekerasan yang menimpa pemeluk Syiah di Sampang dan Nusa Tenggara Barat, pembantaian Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Parung dan Cikeusik, diskriminasi penganut aliran kepercayaan, serta aliran-aliran keagamaan yang divonis sesat oleh otoritas agama, turut memberikan daftar panjang kasus konflik keagamaan berbasis sektarian di Indonesia. Konflik komunal antar umat beragama juga turut memberikan sumbangsih besar dalam memperpanjang kasus konflik berbau agama di Indonesia. Sebut saja

larangan perayaan Natal dan pendirian gereja di Dharmasraya, pelarangan ibadah Natal di Sijunjung, serta peyerangan terhadap tempat ibadah umat Hindu di Buol, Sulawesi Tengah.

Dampak nyata dari konflik keagamaan tersebut tentu jatuhnya korban yang mengakibatkan kerugian besar, berupa kehilangan nyawa(korban jiwa) ataupun kerugian materi. Dalam laporan Varsney, yang dimuat dalam *Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia*, dalam kurun 1990-2001 terdapat 10.402 korban meninggal dunia akibat konflik.¹ Lebih jauh lagi, dalam kurun waktu tersebut terjadi sebanyak 2567 insiden konflik. Selanjutnya, sepanjang tahun 2008-2010, terjadi sebanyak 2.498 insiden kekerasan di Indonesia. Jika dibagi berdasarkan tahun, setiap tahun rata-rata terjadi 701,6 kasus konflik. Pada peristiwa konflik dan kekerasan periode 2008-2010, tercatat sebanyak 340 orang meninggal dunia. Sedangkan korban luka-luka berat dan ringan sebanyak 5.042 orang.

Sementara itu dalam laporan tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) yang diterbitkan Wahid Foundation tahun 2019, mencatat bahwa korban pelanggaran KBB oleh aktor negara, non negara, dan korporasi pada tahun 2019 sebanyak 141 orang. Secara akumulatif mereka yang terdampak adalah kelompok aliran yang dituduh sesat dengan jumlah menjadi korban mencapai 30 orang. Korban terbanyak selanjutnya adalah umat Kristen (19 korban), umat Islam (18 korban), dan warga masyarakat (18 korban).²

Pada dasarnya, studi dan penelitian terkait konflik bukan kajian baru, sebelumnya sudah banyak kajian yang terkait dengan konflik. Sejumlah penelitian sebelumnya menjadikan media massa sebagai sumber rujukan penelitian studi konflik. Merrill & Lowenstein³, Danzger⁴, Franzosi⁵, Olzak

¹ Rio Soumahu, *Dinamika Konflik Dan Kekerasan* (Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2012), 2.

² Wahid Foundation, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 Di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020), 46.

³ J. C. Merrill and R. L. Lowenstein, *Media, Messages and Men: New Perspectives in Communication* (New York: McKay, 1971).

⁴ M. Herbert Danzger, 'Validating Conflict Data', *American Sociological Review* 40, no. 5 (October 1975): 570, <https://doi.org/10.2307/2094196>.

⁵ Roberto Franzosi, 'The Press as a Source of Socio-Historical Data: Issues in the Methodology of Data Collection from Newspapers', *Historical Methods* 20, no. 1 (1987): 5.

1989⁶, Varshney & Tadjoeeddin⁷ adalah beberapa peneliti yang menjadikan media massa sebagai sumber data tentang kasus protes dan kekerasan. Sementara pakar seperti Cho & Lacy⁸, Clarke & Blankenburg⁹, Gerbner¹⁰; dan Littleton¹¹, merupakan peneliti yang menjadikan media sebagai objek kajian, terkait protes dan kekerasan. Yang juga dikenal sebagai studi *media effects research* (pengaruh media).

Sementara itu dalam tiga tahun terakhir, berbagai konflik keagamaan terjadi di Indonesia, dengan tingkat eskalasi konflik yang tinggi. Konflik itu menimbulkan berbagai kerusakan fasilitas publik, dan sarana yang dimiliki masyarakat. Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di Aceh Singkil¹², pembakaran rumah penganut Budha di Mareje¹³, pembakaran masjid Ahmadiyah di Sintang¹⁴, penyerangan warga Syiah di Surakarta¹⁵, dan Perusakan serta Pembakaran Masjid dan fasilitas Pesantren As-Sunnah

⁶ Susan Olzak and Elizabeth West, 'Ethnic Conflict and the Rise and Fall of Ethnic Newspapers', *American Sociological Review* 56, no. 4 (August 1991): 458, <https://doi.org/10.2307/2096268>.

⁷ Ashutosh Varshney, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, and Rizal Panggabean, 'Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990–2003', *Journal of East Asian Studies* 8, no. 3 (24 December 2008): 361–94, <https://doi.org/10.1017/S1598240800006470>.

⁸ Hiromi Cho and Stephen Lacy, 'International Conflict Coverage in Japanese Local Daily Newspapers', *Journalism & Mass Communication Quarterly* 77, no. 4 (25 December 2000): 830–45, <https://doi.org/10.1177/107769900007700407>.

⁹ William B Blankenburg, 'Trends in Violent Content in Selected Mass Media', in *Television and Social Behavior: Reports and Papers*, vol. 1 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1972), 188.

¹⁰ George Gerbner, 'Toward "Cultural Indicators": The Analysis of Mass Mediated Public Message Systems', *AV Communication Review* 17, no. 2 (1969): 137–48.

¹¹ Nan E Feldkamp Littleton, 'Conflict Management of Dangerous Situations' (University of Cincinnati, 1995).

¹² Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93–99.

¹³ Saparwadi, 'Agama Dan Konflik Sosial: Studi Kasus Tentang Konflik Komunal Antar Umat Beragama Di Dusun Ganjar Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat' (IAIN Mataram, 2016).

¹⁴ Abdul Jamil Wahab, 'Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar', *Harmoni* 20, no. 2 (31 December 2021): 188–208, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>.

¹⁵ Ali Makhsum, 'Stigmatisasi Dan Propaganda Anti-Syiah: Sorotan Deskriptif Gerakan Annas', *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 12, no. 2 (2019): 182–91.

Lombok¹⁶. Berbagai kasus kekerasan dalam riset tersebut, faktornya tak terlepas dari sikap intoleransi, paham radikalisme, dan ekstremisme yang pro terhadap kekerasan. Berbagai faktor tersebut menjadi ancaman nyata bagi kebangsaan Indonesia. Terlebih jika paham tersebut diwujudkan dengan tindakan-tindakan ekstrem yang berujung pada kekerasan, seperti pembakaran, perusakan, dan pembunuhan.

Pada sisi lain, timbul pertanyaan, kenapa berbagai konflik agama kian marak terjadi di masyarakat? Baik itu konflik keagamaan antar umat beragama, maupun intra umat beragama, keduanya setiap tahun senantiasa terulang. Dan sejauh mana peran Kementerian Agama dalam menjalankan peran publik untuk menghindari dan mencegah konflik keagamaan di tengah masyarakat? Pertanyaan ini seyogianya penting diajukan pasalnya bertanggung jawab kepada publik dalam menjaga kerukunan, perdamaian, dan harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena itulah, penelitian ini mencoba mendokumentasikan berbagai kasus konflik; intra maupun antar agama di Indonesia. Media daring nasional maupun daerah menjadi sumber data utama dalam memetakan kasus konflik. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat peran Kementerian Agama dalam penyelesaian berbagai kasus konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, kami mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mengumpulkan data konflik keagamaan di Indonesia dari sumber media daring. Kami menerapkan beberapa pembatasan untuk mengatasi kompleksitas penelitian ini. Pertama, kami membagi pencarian konflik menjadi dua kategori utama: peristiwa konflik yang terjadi di lima daerah dengan Indeks Kerukunan Beragama (KUB) terendah pada tahun 2021, serta peristiwa konflik yang dilaporkan oleh media nasional. Selain itu, kami mengidentifikasi konten konflik keagamaan dengan menggunakan teknik pencarian yang spesifik di mesin pencari Google, dengan kata kunci awal seperti "konflik", "konflik keagamaan", dan "konflik [nama daerah]". Kami juga memperluas kata kunci ini untuk mencakup isu-isu terkait konflik keagamaan. Kami membatasi rentang waktu penelitian dari tahun 2019 hingga Agustus 2022 untuk mengukur dampak program mainstreaming

¹⁶ Fitri Rachmawati and Priska Sari Pratiwi, 'Kasus Perusakan Ponpes Di Lombok Timur, Polisi Imbau Warga Tak Terprovokasi', Kompas, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/082919478/kasus-perusakan-ponpes-di-lombok-timur-polisi-imbau-warga-tak-terprovokasi>.

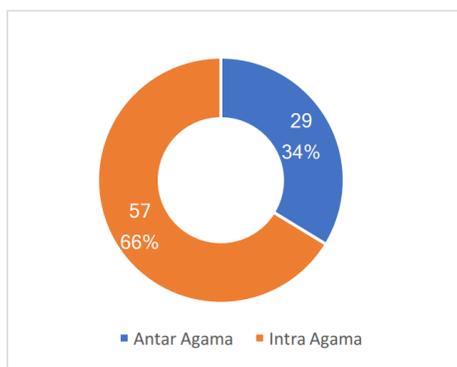
moderasi beragama yang diluncurkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019. Terakhir, kami melakukan pemetaan data untuk mengorganisir informasi konflik yang kami kumpulkan dan melihat keterlibatan Kementerian Agama dalam menangani konflik keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Peta Konflik Keagamaan 2019-2022

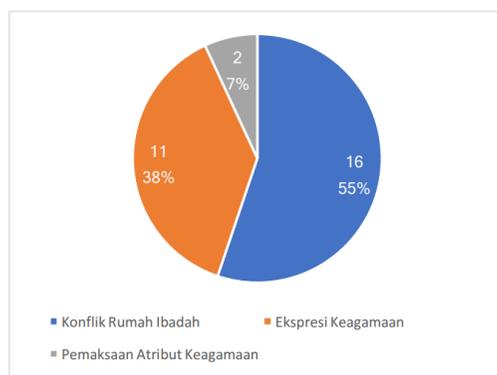
a. Jenis Konflik

Konflik yang terjadi kisaran tahun 2019-2022 dalam penelitian ini dipetakan menjadi dua kategori: konflik antar agama dan intra agama. Konflik antar umat beragama maksudnya ialah perseteruan yang berkaitan dengan masalah keagamaan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain. Sementara konflik intra agama adalah konflik yang terjadi dalam satu agama tertentu. Misalnya, konflik muslim dengan muslim, katolik dengan katolik, dan hindu dengan hindu. Dalam penelitian ini, konflik intra agama yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan umat Islam. Ini bisa dipahami karena Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, penelitian ini menemukan ada sekitar 86 konflik keagamaan di Indonesia. Temuan ini merujuk pada berita media online nasional atau lokal, dan data Kementerian Agama. Konflik yang paling banyak terjadi, seperti tampak dalam gambar 1, adalah konflik yang berkaitan dengan intra agama. Dari 86 kasus, konflik intra agama ditemukan 57 kasus (66 %), sedangkan konflik antar agama 29 kasus (34 %). Artinya, potensi konflik intra agama, khususnya umat Islam, lebih besar ketimbang konflik antar agama.



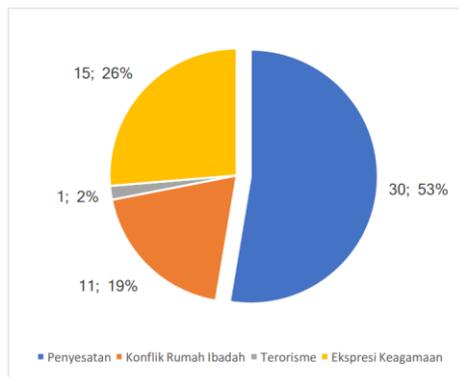
Gambar 1 Jenis Konflik Keagamaan

Konflik antar agama yang paling sering terjadi di Indonesia berkaitan dengan tiga isu besar: konflik rumah ibadah, pembatasan ekspresi agama, dan pemaksaan atribut agama tertentu kepada pemeluk agama lain. Sebagaimana ditunjukkan gambar 2, pendirian rumah ibadah kerap kali memancing perseteruan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya. Ada sekitar 16 (55 %) kasus konflik rumah ibadah dalam 29 34% 57 66% Antar Agama Intra Agama Gambar 1: Grafik Jenis Konflik 16 tiga tahun terakhir ini. Kasus konflik yang didasarkan pada pembatasan ekspresi keagamaan ditemukan 11 kasus (38 %), dan pemaksaan atribusi keagamaan 2 (7 %) kasus.



Gambar 2 Bentuk Konlik Keagamaan

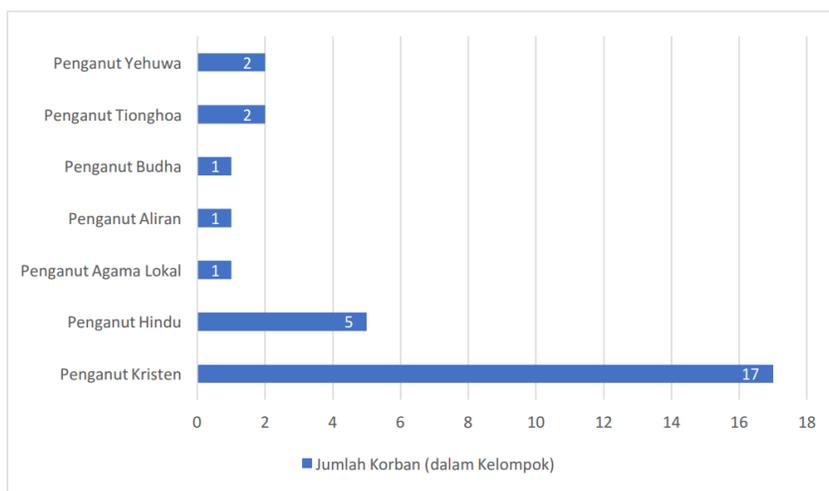
Sementara konflik intra agama dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat isu besar: penyesatan kelompok tertentu di dalam Islam, pembatasan aktivitas dan ekspresi keagamaan, rumah ibadah, dan terorisme. Kasus penyesatan atau pemberian label sesat terhadap satu aliran tertentu, seperti terlihat dalam gambar 3, ditemukan 30 (53 %) kasus , pembatasan aktivitas dan ekspresi keagamaan 15 (26 %) kasus, konflik rumah ibadah 11 (19 %) kasus, aksi terorisme 1 (2%).



Gambar 3 Isu besar Konflik Keagamaan

b. Korban Konflik

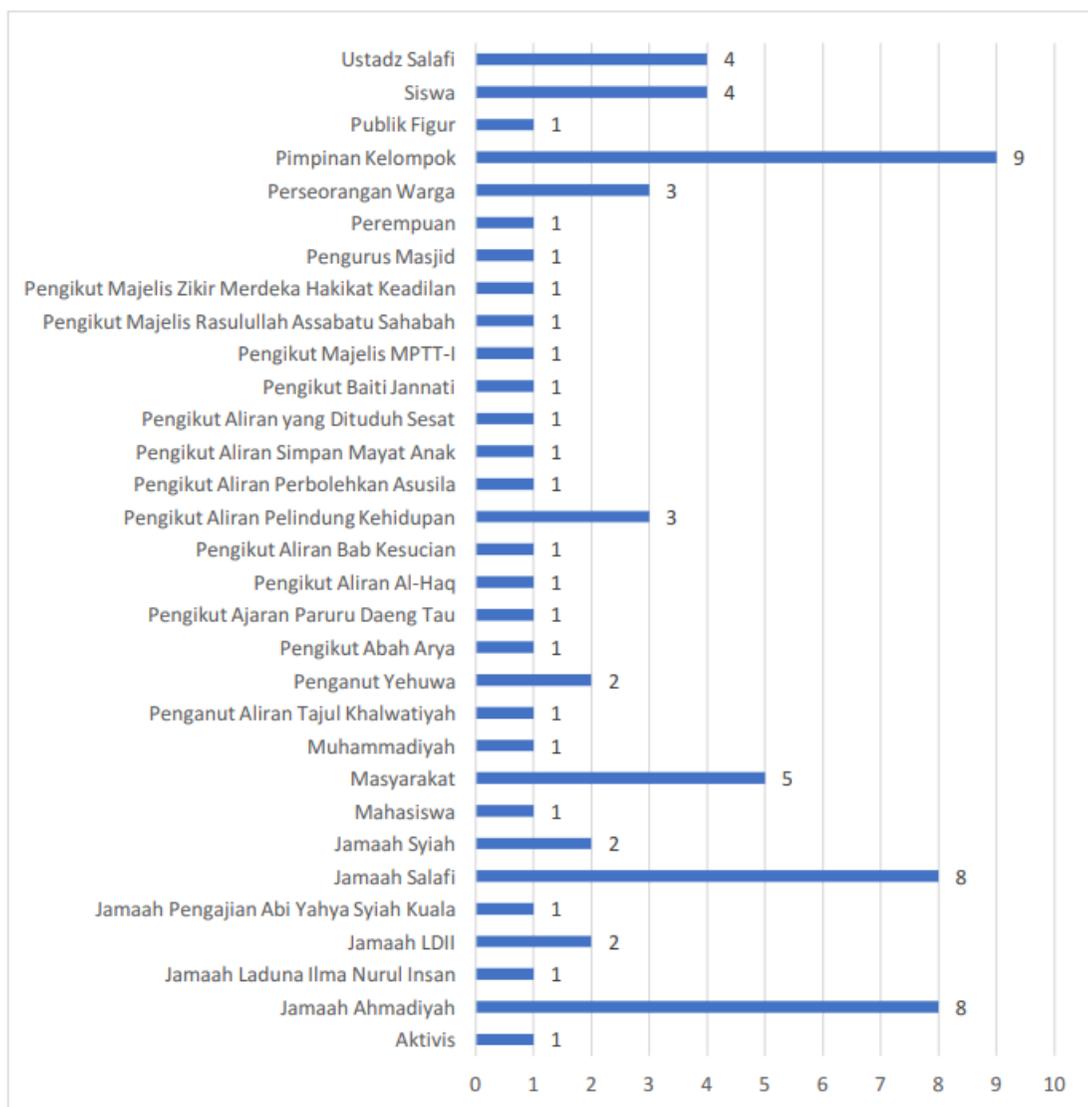
Dilihat dari korban konflik antar agama, pemeluk agama Kristen paling banyak mendapat perlakuan intoleransi dari pemeluk agama lain, baik dalam hal pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas dan ekspresi keagamaan, dan pemaksaan atribut keagamaan tertentu. Gambar 4 menunjukkan dari 29 kasus konflik antar agama, pemeluk agama Kristen menjadi korban dalam 19 kasus konflik, pemeluk agama hindu 5 kasus, penganut agama lokal 2 kasus, Budha dan Tionghoa masing-masing 1 kasus.



Gambar 4 Jumlah Korban Konflik Antar Agama

Adapun konflik intra agama, pimpinan kelompok yang dituduh sesat mendapat perlakuan intoleransi dan penolakan, terutama pada saat menyampaikan dan mengekspresikan keyakinannya. Seperti ditunjukkan pada

gambar 5, ditemukan sekitar 9 kasus penolakan terhadap pimpinan kelompok yang dituduh sesat; diskriminasi terhadap jemaah Ahmadiyah dan Salafi ada 8 kasus, dan sikap intoleransi terhadap individu ataupun masyarakat yang memiliki pandangan keagamaan berbeda dengan mayoritas ditemukan 5 kasus.



Gambar 5 Jumlah Korban Konflik Intra Agama

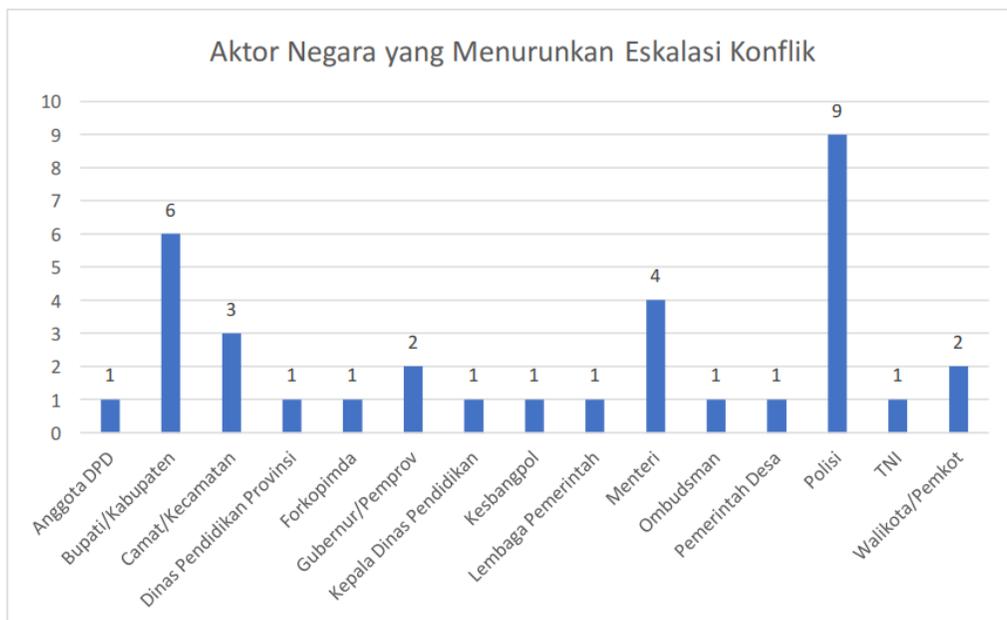
c. Aktor Konflik

Aktor yang dimaksud di sini ialah setiap orang, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam konflik, baik dari negara ataupun masyarakat umum. Keterlibatan mereka bisa saja memperkuat eskalasi konflik atau menurunkan eskalasi konflik. Titian Perdamaian membagi aktor dalam dua kategori: aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) dan aktor fungsional (*functional actor*). Aktor sekuritisasi ialah aktor utama, kebanyakan non-negara, yang dapat memberi pengaruh pada suatu kelompok, seperti tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan lain-lain. Sementara aktor fungsional adalah aktor yang dapat menjembati antara aktor sekuritisasi dengan kelompok rentan. Dalam konteks ini, pemerintah atau negara dapat disebut sebagai aktor fungsional. Kalau pemerintah dapat memainkan peran, bisa menjadi jembatan antara aktor sekuritisasi dengan kelompok rentan, maka eskalasi konflik akan menurun. Tapi kalau tidak mampu memainkan peran, berpihak pada aktor sekuritisasi, konflik akan semakin melebar dan menguat.¹⁷

Perlu digarisbawahi, keterlibatan aktor dalam konflik antar atau intra agama tidak selalu tunggal. Dalam beberapa kasus, ada banyak aktor yang terlibat, sehingga eskalasi konflik semakin menguat. Misalnya, penyegelan masjid Ahmadiyah di Depok tahun 2021. Kasus ini melibatkan Pemkot Depok, Satpol PP, Polisi, TNI, dan masyarakat. Pemerintah kota mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2011, setelah itu diterbitkan pula Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011, dan Satpol PP, Polisi, dan TNI dikerahkan untuk melakukan penyegelan masjid Ahmadiyah. Masyarakat juga turun andil dalam proses penyegelan ini, karena sebagian mereka menolak keberadaan Ahmadiyah dengan melakukan demonstrasi.

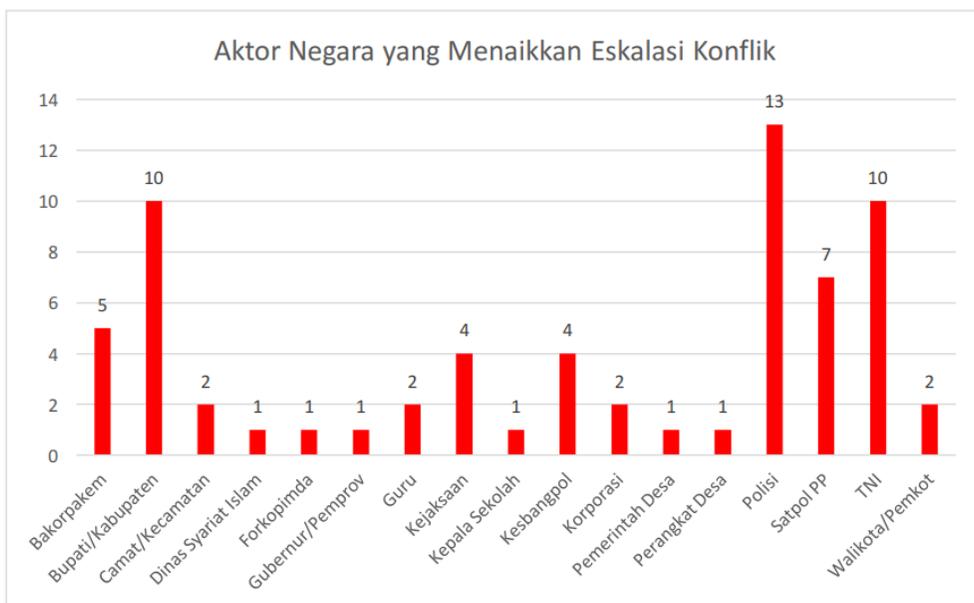
Kalau dilihat dari institusinya, Kepolisian memiliki andil besar dalam menurunkan eskalasi konflik di Indonesia. Gambar 6 menunjukkan, dari 86 kasus tahun 2019-2022, ada sekitar 9 konflik yang berhasil diselesaikan polisi. Selain polisi, Bupati, Menteri, dan Walikota juga dapat memainkan peran dalam menyelesaikan konflik keagamaan. Bupati ditemukan menyelesaikan 6 kasus, Menteri 4 kasus, dan walikota 2 kasus.

¹⁷ PTD PMU Bappenas, *Guideline Institutionalisation: Conflict Early Warning and Early Response System Di Indonesia* (Jakarta: Peace Through Development (PTD) Program Manager Unit (PMU) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006).



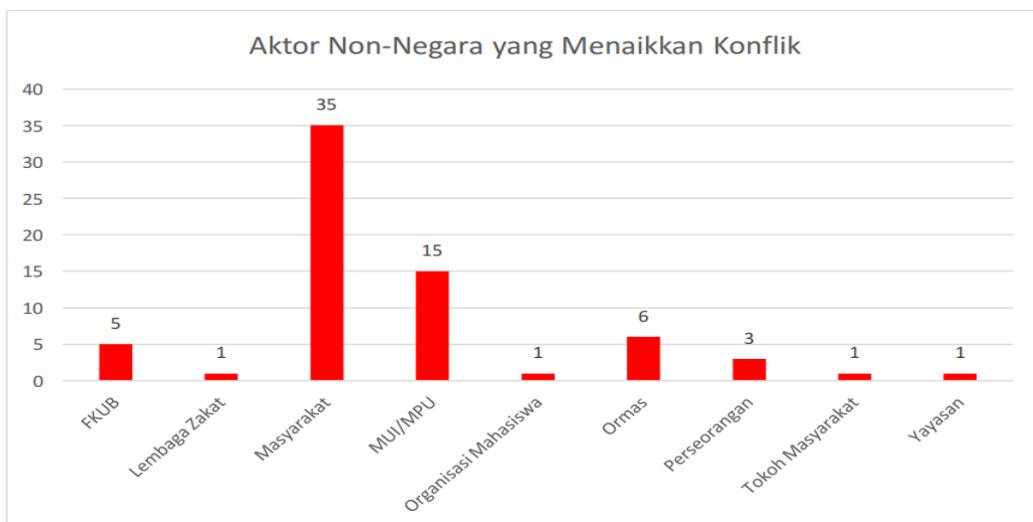
Gambar 6 Aktor Negara yang Menurunkan Konflik

Apabila pada gambar 6, kepolisian memiliki andil besar dalam proses penyelesaian konflik, sebaliknya pada gambar 7, polisi juga berperan dalam menaikkan eskalasi konflik. Ada sekitar 13 konflik yang tidak berhasil ditangani kepolisian dengan baik, sehingga membuat eskalasi konflik semakin tinggi. Selain polisi, TNI, Bupati, dan Satpol PP juga kerap kali membuat konflik keagamaan di masyarakat semakin tegang. Ditemukan 10 kasus yang pertikaiannya semakin kuat karena keterlibatan TNI dan Bupati, dan 7 konflik karena keterlibatan Satpol PP.



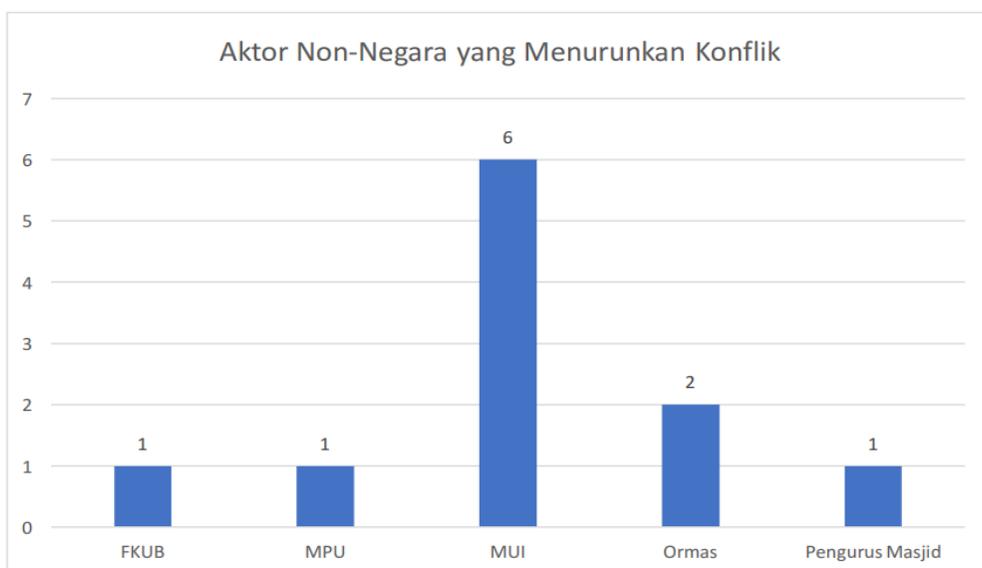
Gambar 7 Aktor Negara yang Menaikkan Eskalasi Konflik

Adapun aktor non-negara, keterlibatannya hampir sama dengan aktor negara. Ada yang memperkuat eskalasi konflik, dan ada pula yang menurunkan eskalasi konflik. Masyarakat umum berada pada posisi paling dalam memperuncing eskalasi konflik. Pada gambar 8 disebutkan ada sekitar 35 kasus. Sebagian besar berkaitan dengan penolakan masyarakat umum terhadap aliran ataupun pandangan keagamaan yang berbeda. Selain masyarakat, lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan Organisasi Masyarakat juga berperan dalam menaikkan eskalasi konflik. Ada sekitar 15 kasus konflik yang menjadi semakin kuat pertikaianya karena keterlibatan MUI dan MPU, 6 kasus karena keterlibatan Ormas.



Gambar 8 Aktor Negara yang Menaikkan Eskalasi Konflik

Peran Majelis Ulama Indonesia sebenarnya tidak selalu menaikkan eskalasi konflik. Penelitian ini juga menemukan praktik baik yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia. Paling tidak, ada 6 kasus konflik keagamaan yang berhasil diselesaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sebagaimana tampak pada gambar 9.



Gambar 9 Aktor Non-Negara yang Menurunkan Konflik

Data keterlibatan aktor di atas menunjukkan bahwa Polisi dan MUI memiliki peran strategis dalam proses penyelesaian konflik di negara ini. Kedua lembaga ini dapat berperan ganda: menaikkan eskalasi konflik atau menurunkan eskalasi konflik. Praktik buruk kepolisian dan MUI dalam penanganan konflik sangat tinggi, dan praktik baik penyelesaian konflik dari dua lembaga ini juga tinggi. Temuan ini tidak jauh berbeda dengan laporan Wahid Foundation tahun 2019 di mana polisi, Pemkab/Pemkab, warga masyarakat, dan MUI kerap kali menghambat proses penyelesaian konflik. Apabila kesadaran masing-masing aktor ini terhadap hak Kebebasan Beragama dan Keyakinan (KBB) semakin baik dan tinggi, maka eskalasi konflik akan semakin menurun. Namun jika kesadaran mereka terhadap hak KBB rendah dan berpihak pada mayoritarianisme, potensi eskalasi konflik akan semakin naik dan tinggi.¹⁸

2. Peran Kementerian Agama dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan di Indonesia

a. Subdit BPKI-PK dan PKUB: Dua Modal Kementerian Agama

Selain memetakan konflik keagamaan, penelitian ini juga berupaya melihat peran Kementerian Agama dalam penyelesaian konflik yang terjadi tahun 2019-2022, baik konflik antar agama ataupun intra agama. Merujuk pada UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Kementerian yang membidangi agama, dalam hal ini Kementerian Agama, termasuk aktor yang berperan penting dalam penyelesaian konflik. Apalagi dalam internal Kementerian Agama sendiri terdapat dua badan khusus yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik keagamaan. Kedua badan itu ialah Subdit Bina Paham Kegamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Subdit BPKI-PK lebih fokus pada penyelesaian konflik atau masalah internal umat Islam, sementara PKUB difokuskan pada konflik antar agama.

Tugas BPKI-PK ialah melakukan pembinaan paham keagamaan Islam dan penanganan konflik sosial keagamaan, bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder, melalui dialog, konsultasi, dan

¹⁸ Subhi Azhari and Gamal Ferdhi, *Laporan Tahunan Wahid Foundation: Kemajuan Tanpa Penyelesaian Akar Masalah* (Jakarta: Wahid Foundation, 2020), 69.

rekonsiliasi sosial, supaya terwujud kedamaian dan kerukunan di internal umat beragama.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 tahun 2016, Subdit BPKI-PK memiliki empat fungsi. Pertama, penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik. Kedua, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik. Ketiga, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik. Keempat, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik.

Untuk menjalankan keempat fungsi di atas, Subdit BPKI-PK memiliki tiga struktur: Pertama, seksi identifikasi paham keagamaan Islam. Tugasnya melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan identifikasi paham keagamaan Islam. Kedua, Seksi Bina Paham Keagamaan Islam. Tugasnya melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan bina paham keagamaan Islam. Ketiga, Seksi Advokasi dan Penanganan Konflik. Tugasnya menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi serta laporan advokasi dan penanganan konflik.

Selain memiliki struktur di level nasional, BPKI-PK juga memiliki struktur di level provinsi, karena pengelolaan urusan agama tidak hanya diserahkan pada pemerintah daerah semata, tetapi juga menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat.²⁰ Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa bidang pemerintahan yang tidak menjadi wewenang daerah adalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Sebab itu, Kementerian Agama memiliki kordinasi dengan pejabat

¹⁹ Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Bidang Paham Keagamaan Islam & Penanganan Konflik* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 5.

Kementerian Agama di daerah, dan mereka punya kewajiban untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan kepada Kemenag.

Tidak hanya memiliki struktur di masing-masing provinsi, Subdit ini juga dibantu oleh para penyuluh agama yang ada pada setiap kecamatan dan kabupaten. Menurut Muhammad Syafaat, tim Pokja Moderasi Beragama, ada dua tugas utama dari penyuluh agama: penyuluh kerukunan umat beragama dan penyuluh radikalisme dan aliran sempalan. Sampai saat ini, jumlah penyuluh agama PNS ada sekitar 5002 dan non-PNS 45.412.²⁰ Mereka tersebar hampir di semua wilayah, dari kota hingga desa terpencil.

Dilihat dari struktur dan jaringannya, BPKI-PK punya potensi besar dalam penyelesaian konflik keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan internal umat agama, dan mewujudkan perdamaian serta kerukunan. Apalagi subdit ini juga memiliki garis kordinasi dengan para penyuluh agama yang jumlahnya sangat banyak, dan tersebar hampir setiap wilayah di Indonesia.

Seperti BPKI-PK, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) juga memiliki jaringan sampai ke level bawah. PKUB mempunyai struktur di Kanwil Kemenag Provinsi dan Kabupaten. PKUB juga bermitra dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. FKUB merupakan wadah bagi tokoh atau aktivis lintas agama untuk berdiskusi, berdialog, dan menyelesaikan persoalan keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya, ada empat kegiatan FKUB yang selama ini sudah berjalan. Pertama, melakukan dialog berbagai tokoh agama dan masyarakat. Kedua, menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan terkait kerukunan umat beragama. Ketiga, menyalurkan aspirasi tentang kerukunan umat beragama kepada pemerintah. Terakhir, mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait kerukunan umat beragama.

Sementara tugas utama PKUB, menurut PMA No. 42 tahun 2016 pasal 879 ialah merumuskan kebijakan dan rencana operasional di bidang kerukunan umat beragama; kordinasi pelaksanaan program kerukunan umat beragama; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerukunan umat beragama; pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan; koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah

²⁰ Kemenag, 'Sistem Elektronik Penyuluh Agama', Kementerian Agama RI, 2022, <https://epa.kemenag.go.id/home>.

kerukunan umat beragama; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kerukunan umat beragama.

Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 dan Renstra Kementerian Agama 2020-2024, PKUB diamanahkan untuk penguatan moderasi dan kerukunan umat beragama. PKUB memiliki tiga tugas utama yang berkaitan dengan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama: perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

PKUB bukti keseriusan Kementerian Agama dalam menyelesaikan konflik antar agama di Indonesia. Apalagi PKUB berada di bawah tanggung-jawab Menteri Agama dan Sekretaris Jendral Kementerian Agama secara langsung. Kepala PKUB Wawan Djunaedi menyadari betul kekuatan PKUB. Dia selalu meminta kepada bawahannya yang berada di wilayah untuk selalu menuliskan laporan konflik yang terjadi di masyarakat. Laporan ini penting untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga dapat dicari solusi yang tepat.

Melalui dua lembaga ini, subdit BPKI-PK dan PKUB, posisi Kementerian Agama dalam penyelesaian konflik keagamaan sangat strategis. Apalagi, Kemenag memiliki jaringan dari atas sampai bawah, jumlahnya pun sangat banyak. Kedua lembaga ini asset berharga Kementerian Agama dan perlu didorong terus untuk menyelesaikan masalah keagamaan dan mewujudkan kerukunan umat beragama.

b. Pendekatan Kementerian Agama dalam Penyelesaian Konflik

Pendekatan pertama yang dilakukan Kementerian Agama ialah membuka ruang dialog. Konflik kerap kali terjadi karena tidak saling mengenal dan berkomunikasi. Pintu dialog mesti terus dibuka agar masyarakat dapat menghargai perbedaan dan bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Dalam penyelesaian konflik, tokoh agama merupakan aktor kunci yang perlu diajak untuk bicara. Tokoh agama punya kuasa untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu,

pertemuan dan dialog yang melibatkan tokoh agama sangat penting untuk dilakukan.

FKUB termasuk salah satu forum yang digunakan Kementerian Agama untuk membuka ruang dialog antar umat beragama. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Menurut PBM tersebut, FKUB didirikan oleh masyarakat pada tiap provinsi atau wilayah masing-masing dengan difasilitasi Pemda setempat.²² FKUB sudah terbentuk hampir di setiap daerah. Tahun 2020 diinformasikan sudah terbentuk sebanyak 542 FKUB di seluruh Indonesia, baik pada tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Kepala PKUB Wawan Djunaedi mengakui selalu melibatkan FKUB dalam penyelesaian konflik. FKUB wadah strategis untuk membantu meredam konflik yang terjadi di banyak wilayah. Wawan Djunaedi mengatakan:

Kemenag RI itu juga punya mitra, lembaga antar kerukunan yang kita sebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum ini biasanya modal kita kalau ada dinamika konflik di lapangan terutama terkait konflik antar agama, contoh sekarang ya kasus di Cilegon. Nah kita langsung kontak kanwilnya, dan kita kontak FKUB nya. Terlebih jika konflik tersebut mengenai tempat ibadah atau lainnya. Di sana kita minta, melakukan dialog agar tercipta deeskalasi konflik.²¹

Presiden Jokowi juga berharap besar pada FKUB untuk selalu membuka ruang dialog dengan pemuka lintas agama. Jokowi mengibaratkan FKUB sebagai miniature kebinekaan. Dalam Rakornas FKUB tahun 2020, beliau menuturkan:

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan miniatur kebinekaan Indonesia. Saya berharap, tidak ada satu pun yang ditinggalkan ataupun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi tenda

²¹ Wawancara dengan Wawan Djunaedi, Senin 13 September 2022

bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan. Pemerintah mendukung agar peran-peran FKUB semakin optimal dalam menyemai nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan dunia.²²

Pelibatan FKUB dalam penyelesaian konflik dan penciptaan kerukunan menunjukkan persegeran paradigma Kementerian Agama. Kemenag menyadari betul pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Pasalnya, pada masa orde baru, masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam meredam konflik dan usaha bina damai. Zainal Abidin Bagir menegaskan, pasca reformasi, Kemenag lebih sadar akan multikulturalisme dan keragaman masyarakat Indonesia. FKUB merupakan tradisi baru dalam program pembangunan yang melibatkan masyarakat. Ini berbeda dengan pendekatan Orde Baru yang menjadikan masyarakat sebagai objek program dan tidak dilibatkan dalam banyak hal. Sementara pada masa sekarang, masyarakat didorong dan difasilitasi untuk bertemu, berdialog, dan membicarakan banyak hal.²³

Selain FKUB, Kementerian Agama juga berperan dalam penyelesaian konflik melalui pelibatan penyuluh agama. Melibatkan penyuluh agama dalam penyelesaian konflik termasuk pendekatan strategis. Selain jumlahnya sangat banyak, mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka paling tahu tentang informasi yang berkembang di masyarakat. Peran penyuluh agama sebagai agen resolusi konflik sudah masuk dalam Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra ini juga disebutkan perlunya penguatan kompetensi aktor kerukunan umat beragama, terutama penyuluh agama. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk penguatan kompetensi aktor ini adalah pendalaman pemahaman terhadap regulasi moderasi dan kerukunan umat beragama; peningkatan kemampuan manajemen

²² 4 Pernyataan Joko Widodo, Presiden RI pada acara Rakornas FKUB, 3 November 2020. Video pernyataan resminya dapat dilihat di: <https://www.youtube.com/watch?v=NnfDSd1-uKqU>, diakses pada: Senin 13 September 2022

²³ J.B. Banawiratma et al., *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan Dan Praktik Di Indonesia* (Yogyakarta: Kerjasama Mizan Publika dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM, 2010), 86.

pengecahan dan penanganan konflik; pelatihan promosi kerukunan umat beragama; penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai.²⁴

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penyuluh sebagai agen resolusi konflik, Subdit BPKI-PK tahun 2022 menginisiasi program Seleksi Penyuluh Agama Agen Resolusi Konflik (SPARK). Mohammad Syafaat, salah satu inisiator SPARK, menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk penguatan tiga hal: peningkatan pengetahuan tentang konflik keagamaan, membentuk keterampilan para penyuluh agama terkait deteksi dan respons dini konflik keagamaan berlatar perbedaan paham dan budaya Islam, dan memotivasi penyuluh untuk aktif di lapangan. Akmal Salim Ruhana, mantan Kasubdit BPKI-PK, menambahkan, SPARK merupakan langkah tepat dalam proses penanganan konflik, karena dengan melibatkan aktor lokal yang mempunyai wawasan resolusi konflik, eskalasi konflik diharapkan tidak akan membesar dan menguat. Apalagi jumlah penyuluh di Indonesia sangat banyak, ini menjadi peluang strategis untuk melibatkan mereka dalam pendeteksian dan penanganan konflik di wilayah mereka masing-masing.²⁵

Kesadaran untuk melibatkan penyuluh agama sebagai agen resolusi konflik tidak hanya muncul dari pusat, tetapi juga berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kanwil Sumatera Barat misalnya, mereka memperdayakan penyuluh agama dengan membuat program one penyuluh one village. Dr. H. Helmi, M. Ag, Kepala Kanwil Sumatera Barat, menjelaskan bagaimana keterlibatan penyuluh dalam penyelesaian konflik di Sumatera Barat. Dia memberikan empat tugas kepada penyuluh. Pertama, mendatangi lokasi kejadian atau konflik. Kedua, kordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten. Ketiga, penyuluh agama diminta untuk bersinergi dengan Babinkabtinmas, Kejaksaan/Bakorpakem, dan MUI. Sinergitas yang dibangun bertujuan untuk bergerak bersama-sama dalam menangani konflik keagamaan, agar tingkat eskalasi konflik tidak naik. Keempat, para penyuluh agama diberikan tugas untuk melaporkan konflik, dan mendaftarkan aliran keagamaan di Sumatera Barat yang dianggap menyimpang.²⁶

²⁴ Kemenag, *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 24.

²⁵ Wawancara dengan Akmal Salim Ruhana (Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama), Selasa, 20 September 2022

²⁶ Wawancara dengan Dr. H. Helmi, M.Ag (Kanwil Kemenag Sumatra Barat), Rabu, 21 September 2022.

Sejauh ini, menurut pengakuan Helmi, seluruh konflik keagamaan, baik intra ataupun antar agama sudah selesai di tingkat kabubapten/kota. Aktor yang berperan besar dalam hal ini adalah penyuluh agama. Berdasarkan data dari Subkor Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam, dari tahun 2020 sampai 2022, sudah ada tiga konflik keagamaan intra agama yang diselesaikan oleh Kanwil Kemenag Sumbar. Seperti terlihat pada tabel 1, tahun 2020, aliran Milah Ibrahim di Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok, statusnya sudah diselesaikan. Kemudian tahun 2021, ada aliran Bermasalah Pelindung Kehidupan di Pauh Nan Duo, Kabupaten Solok Selatan, yang sudah diselesaikan oleh MUI dan Pakem. Ketiga, tahun 2022 ada kasus Bab Kesucian, di Kabupaten Tanah Datar, dengan status terselesaikan.

Tabel 1 Laporan Kasus Konflik yang Diselesaikan Kanwil Sumatera Barat

Nama Aliran	Pimpinan	Kecamatan	Kab/Kota	Keterangan	Tahun
Milah	M. Syakur	X Koto	Kab. Solok	Sudah selesai	2020
Pelindung Kehidupan	Edi	Pauh Nan Duo	Solok Selatan	Sudah selesai oleh MUI dan Pakem	2021
Bab Kesucian	Syaiful	X Koto	Tanah Datar	Sudah selesai	2022

Peran lainnya dari Kementerian agama adalah berupa Mengeluarkan Pernyataan Publik. Mengeluarkan pernyataan publik termasuk pendekatan yang digunakan Kementerian Agama dalam merespons konflik keagamaan. Pernyataan itu biasanya diserbaluaskan melalui media massa, baik cetak ataupun digital. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam tiga tahun terakhir ini, paling sering mengeluarkan pernyataan publik tentang konflik keagamaan dibanding pejabat lainnya. Salah satu pernyataannya ialah mengancam perusakan tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tahun 2021. Tindakan main hakim sendiri, kata Yaqut Cholil Qoumas, apalagi merusak rumah ibadah dan harta benda milik orang lain, ancaman nyata bagi kerukunan umat beragama. Yaqut meminta

aparatus keamanan perlu mengambil langkah dan upaya tegas untuk mencegah dan mengatasi tindakan main hakim sendiri.

Dalam pemberitaan Kompas.com, Menteri Agama meminta pelaku perusakan dan pembakaran juga diproses secara hukum. Pelakunya mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan. Ia meminta pula kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah masing-masing. Sebab hal ini sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.²⁷

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin beberapa kali juga mengeluarkan pernyataan di media tentang konflik internal umat Islam. Misalnya, penolakan keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Depok, dan penyegelan masjid Ahmadiyah Depok. Kamaruddin Amin meminta agar semua pihak patuhi SKB 3 Menteri yang ada. Menurutnya SKB tiga menteri adalah titik moderat yang mengakomodir kepentingan semua pihak dan masih relevan untuk dijadikan instrumen mengatasi masalah Ahmadiyah. Syaratnya semua pihak harus patuh pada SKB tersebut. SKB mengatur apa yang harus dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah, masyarakat dan juga pemerintah.²⁸

Menurutnya, rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sudah berdiri di Sintang agar dapat tetap difungsikan sebagai masjid yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat Muslim. Ia mengatakan kubah masjid rumah ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang telah dibongkar untuk dilakukan alih fungsi sebagai masjid bagi seluruh umat Islam. Jika akan

²⁷ Sania Mashabi and Diamanty Meiliana, 'Menag Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah Di Kalimantan Barat', Kompas, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18242031/menag-kecam-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di-kalimantan-barat>.

²⁸ Detik, 'Sekretariat Ahmadiyah Depok Disegel, Kemenag Ingatkan Soal SKB 3 Menteri', Detik, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5780940/sekretariat-ahmadiyah-depok-disegel-kemenag-ingatkan-soal-skb-3-menteri>.

dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, harus melalui musyawarah dengan jamaah Ahmadiyah sebagai pemilik lahan dan bangunan.²⁹

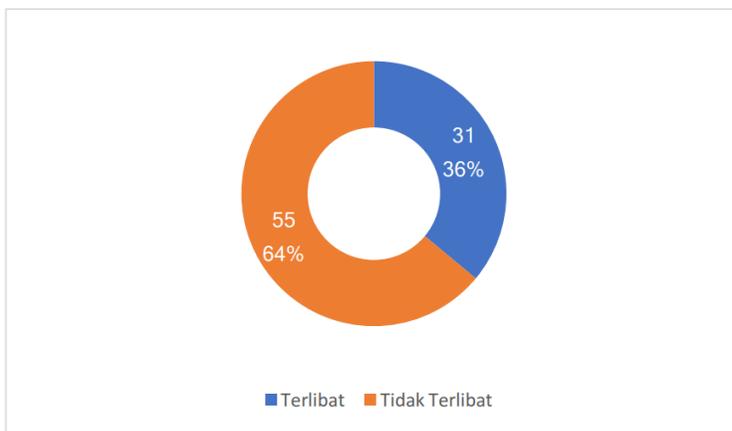
Kalau diperhatikan, mengeluarkan pernyataan publik pendekatan paling sering dilakukan pejabat Kementerian Agama dalam merespons konflik keagamaan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pendekatan ini efektif dan bisa menurunkan eskalasi konflik? Abdul Jamil Wahab, peneliti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), mengibaratkan pendekatan pernyataan publik dalam merespons konflik seperti pisau bermata dua. Pada satu sisi statement publik berguna sebagai upaya dalam meredam konflik, sekaligus menunjukkan peran, dan kehadiran negara dalam merespons isu tersebut. Namun, pada sisi lain, statement publik juga memiliki kelemahan, bahkan bisa menaikkan eskalasi konflik, jika tidak cermat dalam membuat komentar. Penyelesaian konflik tidak cukup dengan sekedar mengeluarkan pernyataan. Itu hanya sebagai langkah awal, setelah mengeluarkan pertanyaan, perlu dilakukan mediasi agar eskalasi konflik tidak naik, dan pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Agama tidak “digoreng” oleh kelompok tertentu.³⁰

c. Respons Kementerian Agama Atas Konflik Keagamaan tahun 2019-2022

Kementerian Agama, seperti disinggung di awal, memiliki potensi besar dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Apalagi, Kemenag mempunyai struktur dan jaringan dari level pusat sampai wilayah. Namun sayangnya, tiga tahun terakhir ini, Kementerian Agama belum terlalu maksimal dalam penyelesaian konflik. Sebagaimana tampak dalam gambar 10, dari 86 konflik yang terjadi tahun 2019-2022, hanya 31 (36 %) kasus yang direspons Kementerian Agama. Sementara 55 (64 %) kasus lainnya tidak mendapat respons.

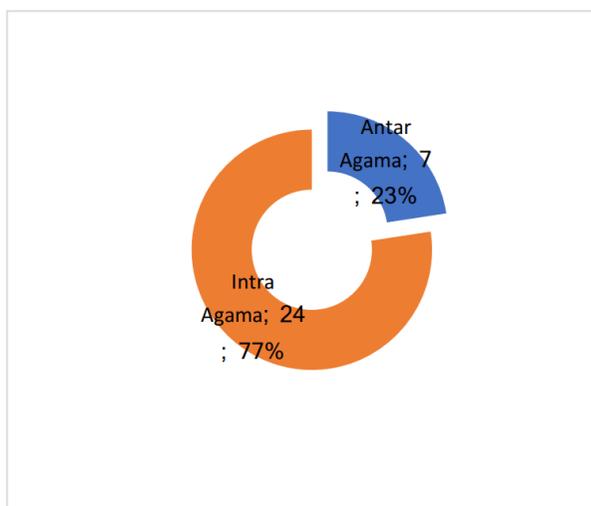
²⁹ Andi Firdaus, ‘Ini Imbauan Kemenag Untuk Rumah Ibadah Ahmadiyah Sintang’, Antara, 2022, <https://kalbar.antaranews.com/berita/503245/ini-imbau-kemenag-untuk-rumah-ibadah-ahmadiyah-sintang>.

³⁰ Wawancara dengan Abdul Jamil Wahab (Peneliti BRIN), Senin, 19 September 2022



Gambar 10 Perbandingan Keterlibatan Kemenag (dalam Kasus)

31 kasus konflik yang direspons Kementerian Agama berkaitan dengan konflik antar agama, dan ada pula yang berkaitan dengan intra agama. Gambar 2 menunjukkan 7 (23 %) kasus konflik antar agama dan 24 intra agama.



Gambar 11 Konflik Intra dan Antar Agama yang Direspon Kemenag

Respons Kementerian Agama terhadap peristiwa konflik tidak selalu berujung pada hasil yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus keterlibatan Kementerian Agama justru berdampak

pada naiknya eskalasi konflik, alih-alih meredam atau menurunkan eskalasi konflik. Apabila dilihat dari tabel di bawah ini, 25 aktor berperan dalam meredam dan menurunkan konflik, sementara 13 lainnya justru memperkuat eskalasi konflik.

Dalam beberapa kasus, Kementerian Agama mampu menjadi jembatan komunikasi bagi kelompok yang sedang bertikai. Kementerian Agama memberi penjelasan, melakukan diskusi dan musyawarah, dan memberikan solusi agar konflik tidak semakin melebar dan menguat. Misalnya, Kementerian Agama bekerjasama dengan Lakpesdam menginisiasi bantuan rumah untuk Ahmadiyah yang digusur dari kampung halamannya. Kementerian Agama meluruskan penyesatan MPTT-I (Majelis Pengkajian Tauhid-Tasawuf Indonesia) Aceh. Bimas Islam menjelaskan kepada publik kalau MPTT-I tidak sesat.

Sementara pada kasus yang lain, Kementerian Agama tidak memberikan solusi, sehingga eskalasi konflik semakin menguat. Misalnya, pelarangan perayaan natal dan pendirian gereja di Dhamasraya tahun 2019, Kanwil Sumatera Barat justru memperkuat sekuritisasi aktor dengan menyatakan pelarangan pendirian rumah ibadah di Dhamasraya sudah sesuai dengan aturan. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh mendukung pelarangan salat Jumat di masjid Salafi Aceh Barat. Alasannya, pendirian masjid Salafi tidak sesuai aturan pendirian rumah ibadah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, dalam periode 2019-2022, Indonesia mengalami sekitar 86 kasus konflik keagamaan, yang dapat dibagi menjadi konflik antar agama (29 kasus) dan konflik intra agama (57 kasus). Konflik intra agama, terutama di kalangan umat Islam, memiliki potensi konflik yang lebih tinggi daripada konflik antar agama, menunjukkan toleransi yang lebih tinggi terhadap pemeluk agama lain. Konflik antar agama umumnya berkaitan dengan masalah rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, dan pemaksaan atribusi agama tertentu. Di sisi lain, konflik intra agama mencakup penyesatan kelompok dalam Islam, pembatasan aktivitas keagamaan, rumah ibadah, dan terorisme, dengan penyesatan kelompok menjadi isu yang dominan. Pemeluk agama Kristen dan kelompok Salafi sering menjadi korban dalam konflik ini. Aktor konflik bervariasi, termasuk aktor negara yang belum selalu berhasil mengatasi konflik, serta

Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik keagamaan. Konflik sering terjadi dalam bentuk aksi damai dan kekerasan, dengan aksi damai lebih banyak terjadi, meskipun ini tidak selalu mencerminkan penerimaan terhadap perbedaan. Lokasi konflik terutama terjadi di Jawa Barat, dan tren konflik keagamaan mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik keagamaan di Indonesia melalui dua badan khususnya, yaitu Subdit Bina Paham Kegamaan Islam dan Penanganan Konflik (BPKI-PK) dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Mereka menggunakan berbagai pendekatan, seperti dialog, partisipasi tokoh agama, dan penggunaan pernyataan publik, serta melibatkan penyuluh agama sebagai agen resolusi konflik. Meskipun memiliki potensi besar, penelitian menunjukkan bahwa respons Kementerian Agama tidak selalu berhasil meredam konflik, misalnya, pelarangan perayaan natal dan pendirian gereja di Dhamasraya tahun 2019, Kanwil Sumatera Barat justru memperkuat sekritisasi aktor dengan menyatakan pelarangan pendirian rumah ibadah di Dhamasraya sudah sesuai dengan aturan. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh mendukung pelarangan salat Jumat di masjid Salafi Aceh Barat. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam menyelesaikan konflik keagamaan di Indonesia.

Referensi

- Azhari, Subhi, and Gamal Ferdhi. *Laporan Tahunan Wahid Foundation: Kemajuan Tanpa Penyelesaian Akar Masalah*. Jakarta: Wahid Foundation, 2020.
- Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein, Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin, Budi Asyhari, Mega Hidayati, and Hanna Rengganis. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Mizan Publika dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.
- Blankenburg, William B. 'Trends in Violent Content in Selected Mass Media'. In *Television and Social Behavior: Reports and Papers*,

- 1:188. Washington, D.C.: Government Printing Office, 1972.
- Cho, Hiromi, and Stephen Lacy. 'International Conflict Coverage in Japanese Local Daily Newspapers'. *Journalism & Mass Communication Quarterly* 77, no. 4 (25 December 2000): 830-45. <https://doi.org/10.1177/107769900007700407>.
- Danzger, M. Herbert. 'Validating Conflict Data'. *American Sociological Review* 40, no. 5 (October 1975): 570. <https://doi.org/10.2307/2094196>.
- Detik. 'Sekretariat Ahmadiyah Depok Disegel, Kemenag Ingatkan Soal SKB 3 Menteri'. Detik, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5780940/sekretariat-ahmadiyah-depok-disegel-kemenag-ingatkan-soal-skb-3-menteri>.
- Dirjen Bimas Islam. *Himpunan Peraturan Bidang Paham Keagamaan Islam & Penanganan Konflik*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Firdaus, Andi. 'Ini Imbauan Kemenag Untuk Rumah Ibadah Ahmadiyah Sintang'. Antara, 2022. <https://kalbar.antaranews.com/berita/503245/ini-imbauan-kemenag-untuk-rumah-ibadah-ahmadiyah-sintang>.
- Franzosi, Roberto. 'The Press as a Source of Socio-Historical Data: Issues in the Methodology of Data Collection from Newspapers'. *Historical Methods* 20, no. 1 (1987): 5.
- Gerbner, George. 'Toward "Cultural Indicators": The Analysis of Mass Mediated Public Message Systems'. *AV Communication Review* 17, no. 2 (1969): 137-48.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. 'Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil'. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93-99.
- Kemenag. *Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- . 'Sistem Elektronik Penyuluh Agama'. Kementerian Agama RI, 2022. <https://epa.kemenag.go.id/home>.
- Littleton, Nan E Feldkamp. 'Conflict Management of Dangerous Situations'. University of Cincinnati, 1995.
- Makhsun, Ali. 'Stigmatisasi Dan Propaganda Anti-Syiah: Sorotan

- Deskriptif Gerakan Annas'. *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah* 12, no. 2 (2019): 182–91.
- Mashabi, Sania, and Diamanty Meiliana. 'Menag Kecam Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah Di Kalimantan Barat'. *Kompas*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/18242031/menag-kecam-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah-di-kalimantan-barat>.
- Merrill, J. C., and R. L. Lowenstein. *Media, Messages and Men: New Perspectives in Communication*. New York: McKay, 1971.
- Olzak, Susan, and Elizabeth West. 'Ethnic Conflict and the Rise and Fall of Ethnic Newspapers'. *American Sociological Review* 56, no. 4 (August 1991): 458. <https://doi.org/10.2307/2096268>.
- PTD PMU Bappenas. *Guideline Institusionalisasi: Conflict Early Warning and Early Response System Di Indonesia*. Jakarta: Peace Through Development (PTD) Program Manager Unit (PMU) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2006.
- Rachmawati, Fitri, and Priska Sari Pratiwi. 'Kasus Perusakan Ponpes Di Lombok Timur, Polisi Imbau Warga Tak Terprovokasi'. *Kompas*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01-03/082919478/kasus-perusakan-ponpes-di-lombok-timur-polisi-imbau-warga-tak-terprovokasi>.
- Saparwadi. 'Agama Dan Konflik Sosial: Studi Kasus Tentang Konflik Komunal Antar Umat Beragama Di Dusun Ganjar Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat'. IAIN Mataram, 2016.
- Soumahu, Rio. *Dinamika Konflik Dan Kekerasan*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2012.
- Varshney, Ashutosh, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, and Rizal Panggabean. 'Creating Datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia, 1990–2003'. *Journal of East Asian Studies* 8, no. 3 (24 December 2008): 361–94. <https://doi.org/10.1017/S1598240800006470>.
- Wahab, Abdul Jamil. 'Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar'. *Harmoni* 20, no. 2 (31 December 2021): 188–208. <https://->

doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506.

Wahid Foundation. *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/-
Berkeyakinan (KBB) Tahun 2019 Di Indonesia*. Jakarta: Wahid
Foundation, 2020.